



BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2022

LKJIP

**KOMPLEK NATUNA
GERBANG UTARAKU,**

**GEDUNG DIKLAT I
LANTAI 1**

RANAI - NATUNA

☎ 08117090112

✉ bpbd@natunakab.go.id

🌐 www.bpbd.natunakab.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	1
	D. Gambaran Umum BPBD	2
	E. Sistematika Penulisan	4
BAB II	Perencanaan Kinerja	
	A. Rencana Strategis	4
	B. Indikator Kinerja Utama	5
	C. Program Kerja dan Kegiatan	6
BAB III	Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Natuna	
	A. Capaian Kinerja BPBD	9
	B. Evaluasi dan Capaian Analisis Kinerja	11
BAB IV	Penutup	12

Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahNya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna 2022 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dalam penyempurnaan hasil-hasil capaian kinerja untuk tahun yang akan datang sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021–2026. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna 2022 ini disusun berpedoman pada Rencana Strategis 2021–2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

LAKIP ini berisi pertanggungjawaban pencapaian kinerja 2022 yang mengacu pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan.

LAKIP ini mungkin masih terdapat kekurangan dalam hal cara penyajian dan sistematika penyusunan. Oleh karena itu, saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kami kerjakan bersama.

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal : 6 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KABUPATEN NATUNA**



RAJA DARMIKA, ST. MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPBD Kabupaten Natuna sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam pelaksanaan urusan bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga BPBD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta perlindungan dari bencana. Capaian kinerja BPBD 2022 masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di mana capaiannya berada pada kategori **Sedang**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kaitan mengelola risiko bencana dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah telah menetapkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam undang-undang ini, dijelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/ wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedang tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pada BPBD Kabupaten Natuna selama Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BPBD Kabupaten Natuna pada Tahun 2022.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPBD Kabupaten Natuna dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan accountable (dapat

dipertanggungjawabkan).

D. Gambaran Umum BPBD

BPBD Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna. BPBD Kabupaten Natuna berada dan bertanggung jawab langsung ke Bupati Natuna.

Pada awal pembentukan BPBD Kabupaten Natuna, BPBD menempati kantor sementara di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna selama 5 hari. Ini dikarenakan BPBD masih belum memiliki gedung kantor sendiri yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas harian perkantoran. Baru pada Senin, 10 Januari 2022 BPBD bisa berpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran setelah BPBD ditetapkan untuk menempati komplek gedung di Gerbang Utaraku, yaitu bekas gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Di gedung kantor yang baru inilah, BPBD Kabupaten Natuna mulai melakukan pelayanan administrasi perkantoran serta pelayanan penanggulangan bencana.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kabupaten Natuna

Sesuai Pasal 4 ayat (1) tugas BPBD adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
4. Koordinasi kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat di bidang pencegahan, penanganan pengungsi, dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dengan sigap dan tanggap.
8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) menerangkan fungsi BPBD sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Natuna

BPBD hanya memiliki 74 orang sumber daya manusia aparatur. Aparatur yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jenis Kelamin 2022

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	PNS	20 Orang	4 Orang
2	PTT	13 Orang	7 Orang
3	Tenaga harian lepas	23 Orang	7 Orang
Jumlah		56 orang	18 orang
Total Laki-laki + Perempuan		74 orang	

Jumlah pegawai laki-laki BPBD lebih besar jika dibandingkan jumlah pegawai perempuan.

Jumlah Pegawai BPBD Menurut Tingkat Pendidikan 2022

Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SLTA	43 orang
DIII	2 orang
DIV/SI	22 orang
S2	3 orang
S3	-

Dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil di BPBD, latar belakang pendidikan setingkat DIV/SI terbanyak dibanding yang lain. Menyusul berikutnya tamatan SLTA sejumlah 5 orang. Dan yang terendah adalah 3 orang tamatan DIII.

Jabatan Struktural	Jumlah
2	3
Kepala Pelaksana Badan	1 Orang
Sekretariat Pelaksana	1 Orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
Bidangan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
Bidang Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Orang

Bila dilihat data di atas, Sekretariat memiliki jumlah eselon yang terbanyak jika dibandingkan yang lain. Ini karena pada Sekretariatlah banyak kegiatan pendukung untuk tiga bidang dilakukan. Sekretariat jugalah yang mempersiapkan kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari, baik dari sisi kelengkapan peralatan pendukung, ketersediaan ATK, internet, mebeulair, atau pun keamanan gedung kantor. Sementara pada bidang teknis, hanya melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan sistem pembagian tugas sudah berlangsung baik, sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan 2022

1.	Pejabat Eselon	6 Orang
2.	Fungsional	8 Orang
3.	Tenaga Administrasi	10 Orang
4.	Tenaga PTT	20 Orang
5.	Tenaga harian lepas	30 Orang
JUMLAH		74 Orang

Peran tenaga administrasi bagi BPBD sangat penting artinya untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi secara umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan teknis yang bersifat langsung. Bagi tenaga administrasi bidang keuangan, akan melaksanakan tugas keseharian di bidang keuangan. Pun demikian tenaga administrasi yang berhubungan dengan urusan pelayanan rutinitas perkantoran, akan melakukan tugas administrasi sesuai dengan apa yang telah tertera dalam ikhtisar jabatan. Dan berikut disampaikan struktur organisasi BPBD Kab. Natuna.

E. Sistematikan Penulisan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. GAMBAR UMUM BPBD
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KAB. NATUNA

- A. CAPAIAN KINERJA BPBD
- B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. REALISASI KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi Misi RPJMD 2021-2026

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2021-2026, membawa perubahan mendasar terhadap arah kebijakan pembangunan di daerah terluar Indonesia ini. Dua pemimpin ini, merumuskan visi lima tahunan yang coba diwujudkan selama masa kepemimpinan mereka. Visi yang dimaksud adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Misi Bupati terpilih tahun 2021-2026 adalah:

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM.
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis.
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur.
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY).
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Telaah terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung BPBD. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke lima yaitu menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada Misi ini selain berperan dalam memberikan pelayanan prima berupa penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, BPBD akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta daya tampung, daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Indikator Kinerja Utama

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Natuna

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Dan berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Natuna.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Natuna 2022-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunkan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP

birokrasi yang bersih dan akuntabel		pemerintahan daerah	
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko bencana di Kabupaten Natuna. IRB diukur melalui rumus:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Keterangan:

Mengutip Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, disebutkan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di kabupaten. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten sesuai dengan bahaya yang dimiliki serta gabungan dari bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah adalah indeks yang mengukur ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, baik bencana alam atau pun bencana non alam. IKD ini memiliki tujuh fokus prioritas dan 71 indikator penilaian, di mana pada akhir penilaian akan didapat sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi bencana di daerah masing-masing. Maka berdasarkan uraian di atas, Indikator Kinerja Utama BPBD adalah:

C. Program Kerja dan Kegiatan

Program BPBD Pendukung Visi Misi RPJMD 2021-2026

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna, hanya melaksanakan dua program, sepuluh kegiatan dan 28 sub kegiatan. Penjelasan rincinya sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana & Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Pelindung & Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kab/ Kota
5. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/ Kota
7. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
8. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
10. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
11. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kab/ Kota
3. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan & Evakuasi Korban Bencana Kab/ Kota
4. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/ Kota
5. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
6. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/ Kota
2. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga & Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/ Kota
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Setiap kegiatan yang ada, diarahkan untuk mengakomodir pelayanan perkantoran dan kebutuhan tiga bidang. Ada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana kegiatan ini akan dijalankan secara berkesinambungan.

Program dan Kegiatan SPM BPBD 2022

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut adalah jenis pelayanan dasar yang masuk dalam standar pelayanan minimal BPBD 2022:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Bencana

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun

Untuk kegiatan SPM ini, pada tahun anggaran 2022, BPBD telah mengalokasikan Rp. 101.026.660, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	50.295.000	30.593.810	19.701.190
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	256.546.010	34.900.000	221.646.010
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	140.060.730	35.532.850	104.527.880
Jumlah		446.901.740	101.026.660	345.875.080

Dari data di atas, dapat digambarkan bahwa telah terjadi pengurangan anggaran kegiatan dan sub kegiatan SPM di Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran di Kabupaten Natuna secara besar-besaran sehingga menyebabkan upaya pelaksanaan urusan bencana yang terkait SPM menjadi terkendala. Namun demikian, secara umum, pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan urusan bencana di Kabupaten Natuna masih dapat disejalankan dengan anggaran yang ada.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KABUPATEN NATUNA

A. Capaian Kinerja BPBD

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran BPBD Kabupaten Natuna, digunakan skala nilai sebagai berikut:

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76-90	Tinggi
3.	66-75	Sedang
4.	51-65	Rendah
5.	≥ 50	Sangat Rendah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD 2022

Pada tahun anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna mengelola dana pembangunan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp. 5.002.419.529,00, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	2022			
	Target Kinerja		Realisasi	
	Output	Anggaran	Output	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3.651.000,00	3 laporan	3.651.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	3.800.268.886	20 orang	3.800.268.886
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67 paket	100.000.000	67 paket	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	157.981.180,00	5 paket	157.981.180,00
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	40.000.000	10 paket	40.000.000
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000 paket	14.500.000	80.000 paket	14.500.000
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 dokumen	9.000.000	5 dokumen	9.000.000
5. Penyediaan Bahan/Material	10 paket	7.500.000	10 paket	7.500.000
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	48.926.000	40 laporan	48.926.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	6.000.000	500 laporan	6.000.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	23.500.000	2 laporan	23.500.000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 laporan	910.337.180	15 laporan	910.337.180
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 kendaraan	36.000.000	2 kendaraan	36.000.000
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung kantor	15.000.000	1 gedung kantor	15.000.000
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jumlah sarana	11.000.000	1 jumlah sarana	11.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				852.606.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				472.467.500

1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 jumlah dokumen	500.000		455.197.500
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10 orang	982.000		17.270.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					164.187.500
1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	1.675.000		42.080.000
2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.020.000	1 dokumen	118.107.500
3.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 peralatan		1 peralatan	4.000.000
3.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	675.000	-	0
4.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 kawasan	1.060.000	-	0
5.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40 personil TRC	33.759.810	-	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					143.403.500
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 SK	4.482.850	2 SK	50.403.500
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 korban ditemukan	750.000	3.338 orang	0
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 korban mendapatkan distribusi logistik	1.000.000	3.338 orang	93.000.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					45.547.500
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.270.000		0
2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.832.000	3 dokumen	0

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Natuna adalah:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	5.1.1.2.1 Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan dengan menghitung tujuh prioritas yang terdiri 71 indikator. Prioritas yang dimaksud adalah:

1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
----	---------------------------------------

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan didapat nilai sebagai berikut:

		Indeks Prioritas	IKD	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.36	0.36	Rendah
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.27		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.25		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.59		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.68		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.20		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.20		

Rendahnya pengukuran IKD Kabupaten Natuna pada 2022 disebabkan oleh beberapa hal:

1. Manajemen pengelolaan pengukuran IKD masih belum maksimal.
2. Masih belum terciptanya satu pemahaman antar SKPD penanggungjawab IKD Kabupaten Natuna.
3. Belum dilakukan rapat pembahasan yang rutin setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan.
4. Belum ada data yang valid terkait pemenuhan bukti pengukuran IKD Kabupaten Natuna

Selain hal yang tersebut di atas, peran serta banyak pihak juga sangat penting, baik dari sisi internal atau pun juga eksternal. Hal ini tentunya akan berdampak pada tersedianya data IKD Kabupaten Natuna secara lengkap dan terukur.

B. Evaluasi dan Capaian Analisis Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Pendukung RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

Indikator Kinerja Utama BPBD yang mendukung RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 berkaitan memiliki program pendukung yang secara khusus menjadi acuan bagi BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2021)	2022					
				Target Kinerja		Realisasi		Persentase	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
MISI 5	Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan								
5.1	Menurunkan risiko bencana								

5.1.1	Indeks Ketahanan Daerah								
05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum Serta LinMas								
05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh bencana		1.30	119.546.660	-		-	

Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Natuna, terutama setelah BPBD terbentuk, tidak mampu mencapai target 1.30%. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
2. Belum memiliki SDM yang terampil dalam penanggulangan bencana
3. Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan kinerja

Secara umum, terkendalanya pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Natuna pada 2022 sepenuhnya disebabkan terjadi pengurangan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 121.573.889. pengurangan ini secara langsung mempengaruhi capaian kinerja di BPBD Kabupaten Natuna. Selain itu, tidak berubahnya target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Perubahan 2022 juga menyebabkan tidak berimbangnya realisasi keuangan dengan realisasi kinerja. Keuangan mengalami pengurangan jumlah belanja sementara target kinerja tidak dilakukan pengurangan.

Secara umum, berikut adalah hasil penilaian capaian kinerja BPBD pada 2022, yang dilakukan secara mandiri.

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	2022		
			Target	Realisasi	%
Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Penanggulangan Bencana	1.30	-	-
Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	66.50	67	100.75%
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	81	101.25%

Mengingat pada akhir 2022 terjadi banjir di sebagian besar Kecamatan Bunguran Timur, pelaksanaan pelayanan bagi korban bencana dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Dan dari hasil pengukuran survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap setiap korban di wilayah terdampak banjir, didapat hasil sangat tinggi, di atas target yang hendak dicapai. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya kerja sama banyak pihak dalam menangani bencana banjir tersebut. Hanya saja, untuk pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana, masih belum terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh BPBD terhadap capaian kinerja 2022, didapat kesimpulan bahwa masih ada indikator sasaran yang belum bisa terwujud sepenuhnya.

Ke depan, upaya untuk membentuk desa/ kelurahan tangguh bencana akan masuk dalam program prioritas di mana pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana ini akan mampu meningkatkan indeks ketahanan daerah, yang pada akhirnya akan menurunkan indeks risiko bencana daerah.

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAJA DARMIKA, ST, MAP**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.38

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.387.645.900,00
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	493.199.740,00
Jumlah	Rp.	4.880.845.640,00

Ranai, 12 Januari 2022

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAJA DARMIKA, ST, MAP**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 4.880.845.640,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh) menjadi Rp. 5.002.419.529,00 (Lima milyar dua juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022
Pihak Pertama,

RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.38

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.882.872.869,00
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	119.546.660,00
Jumlah	Rp.	5.002.419.529,00


Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah


RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003